

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama lebih dari 50 tahun, Indonesia mengandalkan subsidi energi, yang sebagian besar untuk bahan bakar fosil, sebagai pilar utama kebijakan sosial dan ekonominya. Awalnya dirancang untuk mengurangi kemiskinan, memperluas akses ke energi modern, dan mendukung pembangunan industri, subsidi ini memainkan peran penting dalam mengalihkan rumah tangga dari minyak tanah dan kayu bakar menuju gas dan listrik.

Namun saat ini, kebijakan tersebut tidak lagi memenuhi tujuan awalnya.

Indonesia saat ini menghabiskan IDR 203,5 triliun (USD 12,2 miliar) setiap tahun hanya untuk subsidi energi rumah tangga LPG, listrik, dan bahan bakar—sekitar 40% dari total pengeluaran bantuan sosial, hampir 6% dari anggaran negara, dan kira-kira setara dengan seluruh anggaran kesehatan. Meskipun dibingkai sebagai alat untuk keadilan sosial, subsidi tersebut secara tidak proporsional justru lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga berpenghasilan tinggi.

Subsidi ini juga mengunci Indonesia dalam bauran energi yang didominasi bahan bakar fosil. Dengan 72% pembangkit listrik domestik berbasis batu bara, harga yang disubsidi merugikan energi terbarukan, melemahkan upaya pengurangan emisi, dan memperlambat pertumbuhan di sektor energi bersih yang sangat penting bagi daya saing ekonomi jangka panjang Indonesia.

Hasilnya adalah kebijakan yang menjadi beban yang semakin besar pada anggaran negara dengan hasil yang terbatas untuk keadilan, produktivitas, atau pembangunan jangka panjang.

Untungnya, pemerintah telah memiliki semua instrumen yang diperlukan untuk mereformasi sistem subsidi.

Laporan ini menguraikan peta jalan yang praktis dan bertahap untuk mereformasi subsidi listrik dan LPG rumah tangga dengan mengalihkan dukungan dari mensubsidi produk energi menjadi mendukung masyarakat secara langsung.

Rekomendasi utama meliputi:

- **Mengalihkan subsidi dari komoditas kepada keluarga**, memberikan dukungan langsung kepada keluarga yang memenuhi syarat sebagai transfer tunai bersyarat bulanan tetap, alih-alih mensubsidi produk tertentu seperti tabung LPG. Setiap sisa subsidi yang tidak terpakai harus dipertahankan oleh keluarga untuk digunakan untuk pengeluaran terkait energi lainnya, termasuk peningkatan ke energi terbarukan atau teknologi yang lebih efisien.
- **Memungkinkan rumah tangga tanpa akses ke LPG atau listrik jaringan** untuk menggunakan subsidi guna berinvestasi pada solusi energi terbarukan mandiri (*off-grid*), memperluas akses energi di daerah terpencil dan kurang terlayani.
- **Mengintegrasikan subsidi energi ke dalam sistem perlindungan sosial nasional**, meningkatkan penargetan, transparansi, dan efisiensi.

- **Melakukan reformasi secara bertahap seiring waktu**, didukung oleh pembentukan Tim Sosialisasi dan Edukasi Lintas Kementerian untuk memimpin kampanye kesadaran dan keterlibatan publik yang terkoordinasi.
- **Mengalihkan penghematan fiskal dari reformasi subsidi** ke investasi berdampak tinggi pada pendidikan, kesehatan, dan energi bersih yang memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga, komunitas, dan produktivitas.

Menerapkan reformasi ini akan memberikan manfaat yang besar. Diperkirakan IDR 95,97 triliun (USD 5,8 miliar) per tahun dapat dibebaskan dari anggaran negara dan dialihkan ke penggunaan yang lebih produktif. Subsidi akan menjadi lebih adil dan inklusif, dengan dukungan terfokus pada keluarga berpenghasilan rendah daripada yang kaya. Rumah tangga di daerah terpencil dan kurang terlayani akan mendapatkan akses baru ke sumber energi bersih. Berkurangnya ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara akan mendukung tujuan pengurangan emisi Indonesia dan memperkuat industri energi terbarukannya.

Meskipun imbalannya akan signifikan, keberhasilan implementasi reformasi ini akan membutuhkan kemauan politik, kepemimpinan yang berani, dan keterlibatan publik yang kuat. Perlawanan kemungkinan akan datang dari rumah tangga dan bisnis yang saat ini mendapat manfaat dari harga LPG yang disubsidi tetapi tidak lagi memenuhi syarat di bawah sistem yang lebih terarah.

Komunikasi yang jelas dan konsisten akan sangat penting untuk menjelaskan manfaat langsung dari reformasi, menunjukkan skala penghematan anggaran, dan menunjukkan bagaimana dana ini akan dialihkan ke investasi berdampak lebih tinggi yang menguntungkan semua orang, seperti energi terbarukan, pendidikan, dan kesehatan.

Jika dilakukan dengan benar, sistem subsidi energi yang direformasi tidak hanya akan melindungi warga negara Indonesia yang paling rentan; tetapi juga akan memperkuat keberlanjutan fiskal, mempercepat transisi energi, dan membantu membangun ekonomi yang lebih produktif, tangguh, dan makmur.